BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam dunia perbankan, istilah kredit merupakan istilah yang penting karena kredit merupakan salah satu upaya mensejahterakan masyarakat dimana kredit yang diberikan oleh bank nantinya akan menjadi sumber pendapatan karena adanya bunga atas pinjaman kredit yang wajib dibayarkan secara rutin oleh para debitur dalam kurun waktu tertentu. Pemberian kredit ini juga merupakan kegiatan yang memiliki risiko terbesar dalam aktivitas perbankan, sehingga bank harus melakukan analisis risiko kredit dan tetap mengutamakan prinsip kehati - hatian dalam menyalurkan kredit. Oleh karena itu, pemberian kredit haruslah diimbangi dengan manajemen risiko yang ketat (Rai & Purnawati, 2017) dimana persyaratan umum dalam pengajuan kredit adalah melampirkan 1) KTP 2) KK 3) Formulir yang diisi oleh pihak yang mengajukan kredit (Pardede, 2019).

Adanya penyaluran kredit modal kerja kepada masyarakat, tentunya pihak bank mengharapkan kiranya dunia usaha dapat bertumbuh dan dapat menciptakan lapangan kerja, serta dapat menghasilkan pengusaha - pengusaha baru yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan taraf hidup rakyat. Untuk menjaga kredit agar tidak terjadi kebocoran, pemborosan, ataupun penyelewengan dibutuhkan suatu pengendalian kredit yang cukup kuat. Dengan pengendalian kredit yang cukup kuat kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dapat

diminimalisasi. Hal ini berarti pendapatan bank dapat diterima dengan lancar dan akhirnya tercipta kondisi bank yang sehat (Turuis et al., 2017)

Bank dalam melakukan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari NPL suatu bank tidak boleh melebihi 5%. Tingginya tingkat NPL menunjukan kesehatan bank yang rendah karena banyak sekali terjadi kredit bermasalah di dalam kegiatan bank tersebut (En & Suryandi, 2011). Menurut Manulang, (1994 dalam Mahendra 2018: 14) agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik atau dalam usaha organisasi perlu kita perhatikan: 1) perumusan tujuan yang jelas; 2) Pembagian kerja dan delegasi kekuasaan; 3) rentang kekuasaan; 4) tingkat-Tingkat pengawasan; 5) Kesatuan perintah dan tanggung jawab.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diasumsikan bahwa diperlukan jaminan yang kuat dalam prosedur penyaluran kredit kepada pihak yang mengajukan demi menjaga kesehatan sebuah organisasi karena jaminan adalah salah satu bukti bahwa organisasi tersebut memberlakukan pengawasan demi terciptanya manajemen keuangan yang sehat. Namun, ditemukan penyimpangan yang terjadi di *suka-duka* Desa Tajun, Bali dengan sistem *nyilih adan* mereka. Sistem *nyilih adan* memungkinkan pihak yang mengajukan kredit untuk menggunakan nama orang lain yang ada didalam organisasi *suka-duka* untuk dituliskan dalam formulir pengajuan kredit.

Terkait dengan fenomena tersebut, itu bisa dikategorikan sebagai kredit pada entitas informal dimana hal terkait kredit secara informal diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK ETAP) dimana SAK Entitas Privat

memperkenalkan dan menjelaskan secara detail mengenai: 1) konsep biaya atau usaha yang berlebihan (*undue cost or effort*) dibandingkan dengan SAK ETAP yang hanya menjelaskan secara ringkas tentang keseimbangan antara biaya dan manfaat; 2) aset kontinjensi dan liabilitas kontinjensi yang sebelumya tidak diatur tersendiri dalam SAK ETAP; 3) total penghasilan komprehensif yang tidak diatur dalam SAK ETAP; dan 4) konsep pengukuran pada pengakuan awal untuk aset dan liabilitas entitas dan pengukuran selanjutnya untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, aset nonkeuangan, serta liabilitas selain liabilitas keuangan, yang hanya dibahas secara ringkas dalam SAK ETAP (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2021).

Bali sendiri dikenal memiliki dua bentuk pemerintahan desa yang masing - masing mempunyai fungsi, sistem atau struktur organisasi yang berbeda. Dua bentuk pemerintahan desa tersebut yakni Desa Dinas dan Desa *Adat* atau Desa *Pakraman*. Desa Dinas merupakan organisasi pemerintahan desa yang menyelenggarakan fungsi administrasi atau pemerintahan. Sedangkan Desa *Adat* atau Desa *Pakraman* berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman*, menyatakan bahwa Desa *Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Khayangan Tiga* atau *Khayangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dalam harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek budaya dan keyakinan yang dianut menjadi landasan untuk membentuk sistem tersendiri dan tata cara pemecahan masalah sendiri termasuk dalam aspek keuangan.

Salah satu hal yang unik yang ditemukan dalam *suka-duka* ini adalah latar belakangnya dan eksistensinya dimana kelompok *suka-duka* yang bernama *suka-duka* Widya-Kencana berdiri pada tahun 1992, *suka-duka* ini merupakan *suka-duka* tertua di Desa Tajun sendiri. Usia *suka-duka* ini sudah 28 tahun, tetapi *suka duka* ini masih sangat aktif dalam pengorganisasinya dalam melakukan upacara agama. *Suka-duka* tersebut diketahui hanya membuat laporan keuangan sederhana, dimana sumber pendapatan utama dari *dadia* ini adalah berasal dari *peturunan* (iuran wajib) kurang lebih berjumlah Rp. 5000,00 per enam bulan dengan anggota 67 orang. Untuk pembayaran iuran sendiri dibayar 6 bulan sekali setiap mengadakan *paruman* atau rapat anggota pada *Rahinan Buda Kliwon Pahang*. Selain iuran wajib kas pada *suka-duka* ini didapat dari orang menikah dan *pengelet* alat *suka-duka*. Dimana jika ada salah satu anggota keluarga *suka-duka* menikah maka dia harus menyumbangkan atau membayarkan uang sebesar Rp. 200.000,00 ke kas *suka-duka.* Selain itu pemasukan juga didapat dari *pengelet* (pembayaran) alat *suka-duka* seperti tenda, kursi, alas duduk, dan *bale*. Tenda dan *bale* disewakan Rp.50.000,00/hari, kursi Rp. 500,00/biji, alas duduk Rp. 1.500,00/biji.

Suka-duka pada *Dadia Pudeh* ini diketahui memiliki aset sekitar Rp.70.000.000,00 dan jumlah ini dapat digolongkan cukup besar untuk organisasi kecil seperti *dadia*. Namun pertanggungjawaban pemegang amanah di *suka-duka* ini belum dilaksanakan dengan baik yaitu, pemegang amanah hanya membuat laporan keuangan secara sederhana dan tidak adanya rincian yang jelas dari segala pengeluaran yang terjadi, sehingga pertanggungjawaban pemegang amanah dinilai perlu dianalisa, khususnya dalam hal pengendalian internal

Sistem pengendalian internal dapat menjadi strategi yang cocok untuk mendukung sistem informasi akuntansi. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu (Irawati & Satri, 2018). Selain itu, pengendalian internal merupakan suatu proses kegiatan yang dirancang untuk membantu suatu organisasi atau perusahaan guna mencapai efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan terhadap undang - undang, kebijakan dan peraturan lain (Puspita & Artina, 2017)

Oleh sebab itulah analisa pengendalian internal dalam praktik pengelolaan keuangan yang berbasis *sistem nyilih adan anggota* pada *suka-duka* ini merupakan salah satu poin yang menarik untuk dapat dikaji lebih mendalam. Alasan peneliti menggunakan Desa Tajun sebagai obyek penelitian karena disamping peneliti berasal dari desa tersebut yang memungkinkan akan lebih mudah untuk memperoleh data yang diinginkan dan belum adanya penelitian sebelumnya yang meneliti di Desa Tajun terkait analisa pengendalian internal

Adapun penelitian sejenis yang mendukung penelitian ini, dimana diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abhas (2015) dimana penelitian yang dilakukan berjudul Analisis Konsep Amanah Sebagai Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan (Studi Kasus Pada Yayasan La-Royba Bali Bina Insani Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengendalian internal pengelolaan keuangan Yayasan La-Royba Bali Bina Insani yang menerapkan konsep amanah sebagai dasar pengendalian internalnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang

menitikberatkan pada deskripsi serta interpretasi perilaku manusia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen yang selanjutnya dilakukan analisis data dengan model analisis interaktif melalui tiga tahapan yaitu: 1) reduksi data; 2) penyajian data; 3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Yayasan La-Royba Bali Bina Insani melakukan pencatatan keuangannya secara sederhana; 2) dana yang dimiliki yayasan berasal dari pihak eksternal dan internal yayasan; 3) yayasan memberikan kebebasan secara mandiri kepada unit pelaksan teknis yang dimiliki yayasan dalam hal pengelolaan dananya; 4) konsep amanah menjadi dasar utama dalam pengendalian internal pengelolaan keuangan yayasan.

Adapun alasan yang memotivasi dilakukannya penelitian pada *suka-duka* Widya-Kencana ini adalah adalah: 1) *Suka-duka* ini merupakan dari *dadia* yang terbesar yang ada di Desa Tajun *dan* suka-*duka* bisa dikatakaan *suka-duka* yang tertua yang ada di Desa Tajun. 2) *Suka-duka* ini, merupakan salah satu *dadia* terbesar yang ada di lingkungan Desa Tajun dan juga *dadia* ini memiliki jumlah aset yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 70.000.000,00 peminjaman kredit bisa dilakukan dengan cara jika ada diluar anggota *suka-duka* meminjam uang dibolehkan asalkan yang peminjam kredit tersebut kenal dengan salah satu dari anggota *suka-duka*, karena diluar angora *suka-duka* persyaratannya untuk meminjam kredit yaitu meminjam nama dari salah satu anggota tersebut. 3) Didalam *suka-duka* ini, pelaksanaan kredit pada *suka-duka* yang ada di *Dadia Pudeh* Desa Tajun yang sudah berjalan hampir 28 tahun mulai tahun 1992 hingga saat ini.

Dari latar belakang inilah penulis mengangakat judul mengenai **"Analisa Pengendalian Internal Keuangan Dengan Sistem *Nyilih Adan Anggota* Pada *Suka-Duka* Widya-Kencana *Dadia Pudeh* Desa Tajun".** Dimana peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada *Suka Duka* Widya Kencana mengingat sistem nyilih adan dalam organisasi ini bertentangan dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada umumnya dimana antara peminjam dan pihak pemberi pinjaman harus ada transparansi dimana nama pihak peminjam menjadi nama penjamin pinjaman sehingga mudah ditelusuri jika ditemukan indikasi kredit bermasalah, namun sistem nyilih adan ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun dengan sistem keuangan yang baik sehingga memicu ketertarikan peneliti untuk meneliti bagaimana pihak *Suka Duka* Widya Kencana mengelola kredit dengan sistem nyilih adan tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Didasarkan dengan pemamaparan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada pemberian kredit melalui dengan *sistem nyilih adan anggota* pada *suka-duka* Widya-Kencana *Dadia Pudeh* Desa Tajun, diantaranya sebagai berikut:

1) Belum maksimalnya pertanggungjawaban pemegang amanah pada *suka-duka* Widya-Kencana *Dadia Pudeh* Desa Tajun.
2) Perlunya analisa pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dan sistem *nyilih adan anggota* pada *suka-duka* Widya-Kecana *Dadia Pudeh* Desa Tajun.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditetepkan agar penelitian nantinya berfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, diharapkan peneliti yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diberikan beberapa pembatasan masalah oleh karena itu, adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori dan agar peneliti dapat dilakukan secara fokus mendalami dari masalah tersebut yaitu berkaitan dengan analisa pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dengan sistem *nyilih adan anggota* pada *suka-duka* Widya-Kencana *Dadia Pudeh* Desa Tajun.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dalam menyusun penelitian ini penulis terlebih dahulu merumuskan masalah sebagai dasar kajian penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut.

1) Bagaimana pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan berbasis *sistem nyilih adan anggota* pada *suka-duka* Widya-Kencana *Dadia Pudeh*, Desa Tajun?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut.

1) Untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan berbasis *sistem nyilih adan anggota* pada *suka-duka* Widya-Kencana *Dadia Pudeh*, Desa Tajun

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penulis dan juga bagi pihak - pihak yang memiliki kepentingan terhadap penelitian ini. Manfaat dalam penilitian ini berupa manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang diharapkan sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

1) Bagi Penulis

Menambah pengetahuan mengenai analisa pengendalian internal dalam pengelolaan dana di tingkat *Dadia*.

2) Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi para peneliti bidang akuntansi sebagai bahan untuk mendalami obyek penelitian yang sejenis serta bahan dalam mengembangkan penelitian tingkat yang lebih lanjut.

2) Bagi *Prajuru Dadia*

Sebagai referensi dalam hal tentang analisa pengendalian internal dalam pengelolaan dana di tingkat *Dadia*.

3) Bagi Undiksha

Sebagai referensi dalam penerapan Pengabdian Pada Masyarakat (P2M) tentang analisa pengendalian internal dalam pengelolaan dana di tingkat *Dadia* sehingga nantinya bisa diarahkan pada pelatihan di tingkat desa.